



Peran Pemerintah Desa Rendeng dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro

Rio Pradana Aquatama ^{1✉}, Ravik Karsidi ², Drajat Tri Kartono ³

Universitas Sebelas Maret ^(1,2,3)

DOI: 10.31004/jutin.v7i1.24340

✉ Corresponding author:
[pradanario97@gmail.com]

Article Info

Abstrak

Kata kunci:

Pengembangan;
Gerabah;
Edukasi;
Wisata

Tujuan dari penelitian ini Adalah Menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Menganalisis faktor-faktor pendukung peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian peneliti adalah kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif merupakan jenis data yang berbentuk kata-kata serta tindakan secara deskriptif dan mendalam mengenai suatu peristiwa. Data ini berisi analisa kondisi saat ini pada instansi yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat sehingga membantupeneliti dalam menentukan permasalahan. Kesimpulan Dari hasil Peran pemerintah desa dalam memberikan dukungan, terlihat dari pembinaan dan pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Terlepas dari segala peran yang dilakukan Pemerintah Desa Rendeng sebagai pemberi dukungan, secara keseluruhan peran ini belum dapat dikatakan maksimal. Faktor pendukung peran pemerintah desa pada pengembangan desa wisata yang pertama, yaitu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan dinas-dinas terkait mendukung Pemerintah Desa Rendeng dalam menjalankan perannya sebagai animasi sosial dengan melaksanakan pendampingan pembangunan desa, serta membuka jalan kerja sama dan kemitraan desa.

Abstract

Keywords:

Development;
Gerabah;

The purpose of this study is to analyze the role of village government in the development of Pottery Education Tourism Village in Rendeng Village, Malo

*Education;
Tour*

District, Bojonegoro Regency. Analyzing the supporting factors of the village government's role in the development of Pottery Education Tourism Village in Rendeng Village, Malo District, Bojonegoro Regency. The researcher's research methods are qualitative and quantitative. In this study, researchers used qualitative data types. This type of qualitative data is a type of data in the form of descriptive and in-depth words and actions about an event. This data contains an analysis of the current condition of the institution related to the research raised so as to help researchers determine the problem. Conclusion From the results The role of the village government in providing support, can be seen from the coaching and training carried out to improve community skills. Despite all the roles carried out by the Rendeng Village Government as a supporter, overall this role cannot be said to be maximal. Supporting factors for the role of the village government in the development of the first tourism village, namely the Bojonegoro Regency Government and related agencies support the Rendeng Village Government in carrying out its role as a social animation by carrying out village development assistance, as well as paving the way for village cooperation and partnership).

1. INTRODUCTION

Desa merupakan salah satu komponen yang perlu dikembangkan dalam konsep otonomi daerah. Kualitas mutu hidup masyarakat desa juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan wilayah yang mempunyai taraf hidup yang berkualitas dan mandiri. Indonesia yang terdiri atas beragam suku, budaya, bahasa serta kekayaan alam yang melimpah perlu dikembangkan agar tercipta kemakmuran masyarakat di daerah bersangkutan. Pemerintah desa merupakan elemen pemerintah yang dapat menunjang pembangunan nasional dan kemajuan negara Indonesia. Kemampuan pemerintah desa perlu ditingkatkan dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan, serta memperkuat partisipasi masyarakat serta kelembagaannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah kini memiliki peluang yang luas untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi daerahnya, termasuk mengelolasektor pariwisata. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Perekonomian suatu negara bergantung pada industri pariwisatanya. Sektor wisata yang berkembang maju akan mampu mendorong sektor lainnya untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata, seperti sektor perkebunan, pertanian, peternakan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya.

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong dengan memanfaatkan dan mengembangkan industri pariwisata secara maksimal. Terkait hal tersebut, diperlukan pengelolaan yang baik untuk menumbuhkan barang-barang yang berhubungan dengan pariwisata di wilayah Indonesia. Pemerintah kini banyak berinvestasi dalam pengembangan desa wisata dengan tujuan meningkatkan keuntungan devisa, ekonomi, pendapatan daerah, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi rakyat, peluang pertumbuhan bisnis, dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan tempat wisata apabila ditangani secara efektif dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan kawasandi sekitar tempat wisata tersebut. Di dalam perencanaan pembangunan desa wisata hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah menemukan lokasi yang akan dijadikan tujuan wisata.

dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro kinimenempati posisi teratas di Jawa Timur untuk jumlah desa wisata.

Tabel 1. Data Desa Wisata Jawa Timur

No.	Nama Kabupaten	Jumlah Desa Wisata
(1)	(2)	(3)
1	Pacitan	7
2	Ponorogo	19
3	Trenggalek	10

4	Tulungagung	9
5	Blitar	9
6	Kediri	17
7	Malang	4
8	Lumajang	6
9	Jember	4
10	Banyuwangi	5
11	Bondowoso	2
12	Situbondo	10
13	Probolinggo	1
14	Pasuruan	4
15	Sidoarjo	7
16	Mojokerto	5
17	Jombang	7
18	Nganjuk	5
19	Madiun	9
20	Magetan	9
21	Ngawi	5
22	Bojonegoro	32
23	Tuban	4
24	Lamongan	3
25	Gresik	3
26	Bangkalan	1
27	Sampang	2
28	Pamekasan	5
39	Sumenep	1
30	Kota Batu	0
Jumlah		205

Peringkat ke dua berdasarkan tabel di atas diduduki oleh Kabupaten Ponorogo dengan jumlah Desa Wisata sebanyak 19, peringkat ke tiga Kabupaten Kediri dengan 17 Desa Wisata, peringkat ke empat Kabupaten Situbondo dan Trenggalek dengan 10 Desa Wisata, serta peringkat ke lima ditempati oleh Kabupaten Tulungagung, Madiun, Blitar dan Magetan dengan masing-masing memiliki 9 Desa Wisata. Ditinjau dari objek, peran, lokasi, besaran, dan karakteristiknya, daya tarik wisata di pedesaan tentu berbeda dengan daya tarik wisata di kawasan metropolitan. Hal itu tentu berpengaruh pada perencanaan pengembangannya. Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan pengembangan pariwisata di pedesaan. Hal itu terkait dengan lokasi dan aksesibilitas fasilitasnya sehingga dapat menciptakan keanekaragaman desa.

Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 419 desa dan 28 kecamatan secara administratif. Desa Rendeng, salah satu desa di Kabupaten Bojonegoro, memiliki luas 52,8 Ha dan terletak di Kecamatan Malo. Berdasarkan berbagai sumber yang diperoleh, diketahui bahwa potensi sumber daya alam di Desa Rendeng

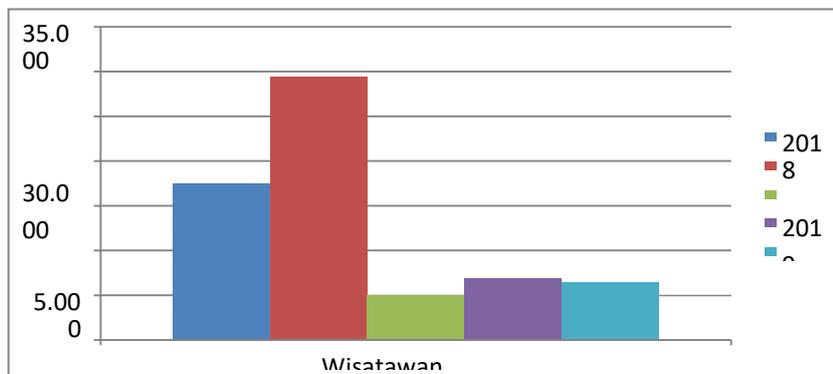
sangat besar. Hal ini didukung oleh lokasi kawasan yang berbatasan dengan Sungai Bengawan Solo, sehingga memungkinkan penduduk setempat memanfaatkan kualitas tanah di sepanjang tepian sungai dan di dasarnya untuk memproduksi gerabah. Gerabah merupakan salah satu kerajinan lokal paling lama di Indonesia. Kearifan lokal ini perlu dikembangkan untuk mencegah kepunahan dan memudarnya minat masyarakat dalam melestarikan gerabah.

ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama dengan LSM Tropis serta SKK Migas, juga menginisiasi dan turut mendukung berjalannya program pengembangan masyarakat di Desa Rendeng. Program ini dapat membantu perekonomian masyarakat setempat, baik dalam hal jual beli gerabah maupun faktor lain yang berkaitan dengan pariwisata. Pengembangan wisata edukasi gerabah ini merupakan program pemberdayaan masyarakat pedesaan yang menekankan pada perbaikan lokasi wisata, pemutakhiran peralatan, dan peningkatan sumber daya manusia.

Tabel 2. Jumlah Wisatawan Nusantara Desa Wisata Edukasi Gerabah Tahun 2018 – 2022

No.	Tahun	Wisatawan Nusantara
(1)	(2)	(3)
1	2018	17.430
2	2019	29.313
3	2020	4.958
4	2021	6.912
5	2022	6.380
Jumlah		64.430

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, 2022



Gambar 1. Data Wisatawan Nusantara Desa Wisata Edukasi Gerabah Tahun 2018 – 2022 dalam Grafik

Dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir, yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 jumlah wisatawan di Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah wisatawan tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebanyak 29.313 pengunjung dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 dengan 17.430 pengunjung. Jumlah pengunjung yang memuncak pada tahun 2019 ternyata tidak bertahan lama. Pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, 2021, dan 2022 jumlah pengunjung Desa Wisata Edukasi Gerabah mengalami penurunan yang cukup drastis dengan masing-masing jumlah pengunjungnya sebanyak 4.958, 6.912, dan 6.380 orang.

2. METHODS

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif karena metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna-makna secara mendalam. Menurut John W. Creswell (dalam Rukajat, 2018:4), fenomena yang berlangsung dalam konteks partisipan dan lokasi penelitian termasuk dalam penelitian kualitatif. Noeng Muhadjir (dalam Rukajat, 2018: 4) menegaskan bahwa penelitian kualitatif berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan pembenaran tentang bagaimana orang berperilaku dalam konteks sosial. Menurut Paul D. Leedy dan Jeanne Ellis Ormrod (dalam Rukajat, 2018: 7), penelitian kualitatif menekankan fenomena yang diteliti dalam tatanan alamiahnya dan memusatkan perhatian pada fenomena tersebut secara keseluruhan, dalam segala kompleksitasnya.

Penelitian kualitatif deskriptif dipilih oleh peneliti karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan yang mendalam terkait fenomena dan fakta yang relevan terkait upaya pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro Di dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah penelitian atau situs penelitian, dengan pertimbangan bahwa di daerah ini merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi produksi gerabah tradisional dan modern, dan telah dikembangkan menjadi tempat wisata edukasi bagi pelajar oleh pemerintah kabupaten setempat. Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah tersebut tepatnya berada di Desa Rendeng, Kecamatan Malo. Kecamatan Malo yang dilintasi Sungai Bengawan Solo ini terkenal

akan kerajinangerabahnya. Peneliti memilih lokasi tersebut karena melihat perkembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah yang cukup baik dan signifikan. Desa wisata edukasi yang telah dikembangkan tersebut telah menarik ribuan wisatawan untuk berkunjung. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa setempat untuk terus mendorong perkembangan wisata edukasi gerabah. Wisata edukasi sendiri merupakan suatu perjalanan wisata yang mempunyai tujuan edukasi dan pemberian nilai kepada para pengunjungnya.

Di dalam penelitian ini peneliti menjadikan Desa Wisata Edukasi Gerabah sebagai objek penelitian, karena keberadaan desa wisata edukasi ini telah berdampak baik bagi industri pariwisata Bojonegoro dan berhasil meningkatkan pemasukan pemerintah desa. Keberhasilan peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata berbasis desa ini juga mampu mendorong desa-desa lain untuk ikut berinovasi mengembangkan potensi yang ada di desanya. Oleh karena itu, pemilihan situs ini dinilai sangat tepat bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah. Subjek penelitian merupakan informan yang dimintai keterangan dan informasi mendalam terkait dengan peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Di dalam penelitian ini untuk mencari informan dilakukan dengan sistem *purposive sampling* atau pengambilan dengan sengaja, yang berarti teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu untuk memperoleh *key informan* atau orang-orang yang mengetahui dengan benar, lengkap dan terpercaya.

3. RESULT AND DISCUSSION

Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Bojonegoro

Peran sebagai pengorganisasi pada penelitian ini berarti keterampilan Pemerintah Desa Rendeng dalam mengorganisasi dan melibatkan kemampuan masyarakatnya, untuk berpikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di desa Rendeng. Pada rencana awal pembentukan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Pemerintah Desa Rendeng membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk membantu pengembangan wisatanya. Seiring berjalannya waktu, Pokdarwis tersebut diganti dengan organisasi khusus pengelola wisata edukasi gerabah dengan mengubah beberapa struktur. Pada pengembangannya, Desa Wisata Edukasi Gerabah tidak lepas dari peran besar BUMDes dan Karang Taruna. Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab, telah mengarahkan organisasi-organisasi tersebut untuk bersama-sama membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, melalui pengembangan desa wisata. Organisasi tersebut telah berperan besar dalam melakukan pemasaran dan pengenalan produk gerabah ke daerah atau kota-kota lain. Di samping itu, juga membantu masyarakat dalam membuat design produk agar lebih menarik pengunjung dan pembeli. Karang Taruna sebagai penggerak utama dikembangkannya Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, mendapat atensi utama dari Pemerintah Desa. Organisasi Karang Taruna tidak perlu diragukan lagi mempunyai peran strategis bagi bangsa dan negara. Di samping sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda, Karang Taruna juga menjadi mitra yang baik bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa.

Sesuai dengan teori tersebut, pembuatan aturan dan kebijakan dapat menjadi landasan penting bagi pemerintah desa, dalam mengarahkan dan memandu aktivitas organisasi pengelola desa wisata. Seperangkat aturan atau regulasi diperlukan sebagai ciri hukum dan yuridis formal bagi suatu masyarakat, untuk menjadi daerah tujuan wisata. Kemampuan mengelola desa wisata secara profesional juga dapat meningkat dengan bantuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa wisata. Sayangnya, dalam hal ini Pemerintah Desa Rendeng belum membuat dan merumuskan peraturan desa yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata edukasi gerabah, agar segala aktivitas organisasi pengelola desa wisata tersebut dapat diarahkan dan berjalan lebih terstruktur. Hal ini menjadi salah satu penghambat pemerintah desa dalam menjalankan perannya sebagai pengorganisasi, karena kebijakan atau peraturan dapat disebut sebagai salah satu tonggak keberhasilan pengembangan pariwisata dalam mencapai tujuannya. Hasil wawancara peneliti dengan Informan 4, selaku anggota karang taruna diperoleh bahwa terkait keinginan Pemerintah Desa untuk menarik tarif bagi setiap pengunjung Desa Wisata Edukasi Gerabah, sampai sekarang belum dapat terwujud. Hal itu karena belum adanya peraturan desa yang bisa digunakan sebagai landasan. Di satu sisi, Pemerintah Desa Rendeng meminta Karang Taruna untuk menarik tarif bagi setiap pengunjung desa wisata agar pendapatan masyarakat meningkat. Di sisi lain, tidak adanya peraturan desa yang mengatur terkait desa wisata ini menjadi penghambat diterapkannya penarikan tarif tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, didapat bahwa adanya peraturan desa dalam

pengembangan desa wisata sangat diperlukan untuk memandu tindakan organisasi pengelola desa wisata, baik Karang Taruna maupun BUMDes dalam menjalankan tujuan pemerintah.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Bojonegoro.

Peran pemerintah desa dalam Pengembangan desa menjadi sebuah desa wisata pasti menemui faktor pendukung dan penghambatnya. Di sini peneliti telah menguraikan faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng. Sejumlah faktor turut mendukung keberhasilan peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata. Di dalam menjalankan perannya sebagai animasi sosial, Pemerintah Desa Rendeng didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta dinas terkait meyakini bahwa desa wisata tersebut dapat meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga turut membantu pemerintah desa dalam melakukan promosi di berbagai pameran. Adanya dukungan ini sangat membantu Pemerintah Desa Rendeng dalam menjalankan perannya sebagai animasi sosial, yakni menginspirasi, membangkitkan energi, antusiasme dan memotivasi masyarakat agar ikut andil dalam pengembangan desa wisata. Pada pengertian ini, mengandung makna bahwa pemerintah desa sebagai animator, harus mampu mengilhami, menumbuhkan antusias, menstimulasi, serta menggerakkan masyarakat untuk melakukan suatu aksi. Peran pemerintah sebagai animasi sosial tersebut, bertujuan untuk mengaktifkan semangat dan kekuatan yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan desa wisata melalui kegiatan bersama. Di dalam kondisi ini, pemerintah desa harus memiliki antusiasme yang tinggi sehingga dapat menciptakan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Terkait hal ini, bukan berarti pemerintah desa melakukan segalanya sendirian, tetapi tetap memungkinkan pemerintah kabupaten untuk aktif terlibat dalam mendukung pengembangan desa wisata.

Dukungan ini sangat berpengaruh dan memudahkan pemerintah desa dalam upayanya menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif pada pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah. Dukungan aktif pemerintah kabupaten ini dinilai menjadi faktor penting dan krusial, dalam mewujudkan desa wisata yang mempunyai daya tarik tinggi di Desa Rendeng. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang didalamnya termasuk RT dan RW, sebagai mitra pemerintah desa berfungsi dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat. RT dan RW ini dapat dikatakan sebagai salah satu ujung tombak dalam menyukseskan setiap kebijakan pemerintah desa. Kewajiban RT dan RW tidaklah ringan, mereka tidak hanya dituntut kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas, tetapi juga harus dapat melayani, mengayomi serta menumbuhkembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat yang dipimpinnya dalam keikutsertaannya membangun daerah. Pemerintah Desa Rendeng dalam mengembangkan Desa Wisata Edukasi Gerabah sempat menemui sejumlah konflik di tengah masyarakat. Konflik tersebut berhasil diatasi dengan adanya dukungan dari RT dan RW setempat. Pemerintah Desa Rendeng bersama RT dan RW, sering melakukan musyawarah dan rembuk desa bersama masyarakat untuk membahas arah dan tujuan pengembangan desa wisata, yang semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Dukungan ini sangat membantu Pemerintah Desa Rendeng dalam menjalankan perannya sebagai mediator dan negotiator. Seperti diketahui, dalam masyarakat seringkali terjadi konflik antara berbagai kepentingan yang melibatkan kekuatan. Terkait hal itu, pemerintah desa harus mampu menyelesaikan konflik yang terjadi dan membangun kesepakatan

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian Peran Pemerintah Desa Rendeng sebagai animasi sosial, dapat dilihat dari pemerintah desa yang memberikan kesempatan yang luas bagi BUMDes dan Karang Taruna; memberi inspirasi dan memotivasi warga sekitar untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengembangan desa wisata; meningkatkan antusiasme masyarakat; serta menginisiasi program-program yang berkaitan dengan pelatihan dan pemasaran gerabah. Pemerintah Desa Rendeng dalam hal ini telah berupaya menjadikan masyarakatnya lebih unggul, kreatif, inovatif, dan mempunyai daya saing tinggi. Pemerintah desa di dukung oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan dinas-dinas terkait untuk menciptakan desa yang mandiri. Sayangnya, peran tersebut belum dapat berjalan optimal karena kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Peran pemerintah desa dalam mediasi dan negosiasi, dapat dilihat dari adanya rembuk desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa Rendeng juga mensosialisasikan komitmennya untuk membawa kepentingan desa dalam proses pengembangan desa wisata. Pemerintah Desa Rendeng dinilai telah berhasil dalam melakukan peran mediasi dan negosiasi. Keberhasilan peran ini, didukung oleh RT dan RW, yang membantu memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa pembangunan Desa Wisata Edukasi Gerabah ini semata-mata untuk kepentingan dan

kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah desa dalam memberikan dukungan, terlihat dari pembinaan dan pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Pemerintah Desa Rendeng juga sering mengikuti pameran-pameran saat ada *event*. Dapat dikatakan bahwa pemanfaatan sumber daya dan keterampilan oleh Pemerintah Desa Rendeng pada pengembangan desa wisata ini telah berhasil. Keberhasilan peran ini didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan EMCL yang membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi berbagai program pemberdayaan masyarakat dan ketersediaan alat pembuatan gerabah.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa pada proses pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Faktor pendukung peran pemerintah desa pada pengembangan desa wisata yang pertama, yaitu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan dinas-dinasterkait mendukung Pemerintah Desa Rendeng dalam menjalankan perannya sebagai animasi sosial dengan melaksanakan pendampingan pembangunan desa, serta membuka jalan kerja sama dan kemitraan desa. Kedua, RT dan RW membantu pemerintah desa dalam perannya sebagai mediator dan negotiator, dengan melakukan musyawarah dan rembung desa. Ketiga, RT dan RW mendukung peran pemerintah desa sebagai fasilitator kelompok dengan ikut berpartisipasi dalam kerja bakti dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas di lokasi wisata. Keempat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membantu memfasilitasi berbagai pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Kelima, Pemerintah Desa Rendeng mendapat bantuan program pengembangan usaha kreatif dari EMCL. Keenam, Partisipasi aktif dari Karang Taruna sangat mendukung Pemerintah Desa Rendeng dalam menjalankan perannya sebagai pengorganisasi.

5. REFERENCES

- Achmad, Mansyur. (2018). *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa (Perspektif Regulatif dan Aplikatif)*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- Amerta, I Made Suniastha. (2019). *Pengembangan Pariwisata Alternatif*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Andriwiguna, Adhy. (2022). *Kebijakan Pengembangan Pariwisata*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Arif, Mirrian Sjoftyan. (2016). *Manajemen Pemerintahan: Hubungan Antara Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Banten: Universitas Terbuka.
- Gainau, Marya. B. (2016). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PTKanisius.
- Hawke, Neil dan Neil Parpworth. (2021). *Pemerintah Daerah Seri Pengantar Hukum Administrasi, Widowati, terj.* Yogyakarta: Nusamedia.
- Kadji, Yulianto. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Keban, Yeremias T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Nugroho, Riant dan Firre An Suprpto. (2021). *Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 1: Konsep Dasar*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ridwan, Mohamad dan Windra Aini. (2019). *Perencanaan Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Alfianto, Ferbiansyah Yona dan Agus Machfud F. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Pakuncen. *E-Journal Universitas Negeri Surabaya*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/44589/37870>
- Desa Rendeng Bojonegoro Kembangkan Wisata Edukasi Gerabah - ANTARANEWS Jawa Timur. (n.d.). Retrieved October 5, 2022, from <https://jatim.antaranews.com/berita/193801/desa-rendeng-bojonegoro-kembangkan-wisata-edukasi-gerabah>
- Ekarishanti, Chrecencya dan Kismartini. (2017). *Voluntary Instrument pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Bantargebang*. 1–15.
- Iswanti, S. I. S., & Zulkarnaini, Z. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92–103. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9307](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9307)
- Larasati, D. C., & Kurrahman, Y. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Wisata Hutan Pinus Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. *Reformasi*, 9(2), 161. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1509>
- Mantu, Yukiko Hiro. (2019). Studi literatur: pariwisata sebagai ilmu pengetahuan, disiplin ilmu atau kajian. *Jurnal*

Hospitality, Vol.8,No.2, Desember 2019. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIH/article/view/20/19>

Prayudi, Made Aristia, dkk. (2018). Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 449 –467.

Rochim, Ahmad. (2018). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul (Studi pada Desa Wisata Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*. 137-154.

Sumantri, D. (2019). Strategi pengembangan desa wisata di Kelurahan Jelekong, Kabupaten Bandung. *Jurnal Geografi Lingkungan Tropik*, 2(2), 28–41. <https://doi.org/10.7454/jglitrop.v2i2.47>

Suryadi, Novan. (2020). Peran Pemerintah dalam Menangani Banjir di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2020,8 (2): 425-436.

Suryaningsih, O., & Nugraha, J. T. (2018). Peran Lembaga Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Wanurejo dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 02(01), 120–128.

Syaifudin, M. Y., & Ma"ruf, M. F. (2022). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)* Moch Yusuf Syaifudin Muhammad Farid Ma " ruf. 17–30.